

Transmigrasi Dan Proses Marjinalisasi Ekonomi Orang-Orang Papua Di Tanah Papua

Rahmat Hidayat

Universitas Tadulako

email: hidayatuntad92@gmail.com

Abstract. *The development project through transmigration in 1984 to several islands in Indonesia, including Papua, was a neoliberal program supported directly by the World Bank. The transmigration project has opened up new consumption spaces, as well as starting the economic marginalization of the local population in Papua. The increase in the Papuan population along with the transmigration program during the New Order era was apparently unable to improve the welfare of indigenous Papuans. Transmigration in Papua succeeded in introducing new cultures or modes of economic production that replaced the old modes of production practiced by Papuans. The transmigration program in Papua has been the beginning of the economic marginalization of indigenous Papuans. The economic inequality generated by the transmigration project results in discrimination against indigenous Papuans in the field of economic endeavors. This is what happens to Papuan mothers who have to be willing to walk on sacks in front of large kiosks for immigrants in Papua. The aim of writing this article is to provide an overview of the economic marginalization created by the neoliberal development project in Papua.*

Keywords: *Neoliberal Development, Papuan People, Economic Marginalization.*

Abstrak. Proyek pembangunan melalui transmigrasi pada tahun 1984 ke beberapa kepulauan di Indonesia termasuk Papua, adalah program neoliberal yang didukung langsung oleh Bank Dunia. Proyek transmigrasi tersebut telah membuka ruang-ruang konsumsi baru, sekaligus mengawali marjinalisasi ekonomi terhadap penduduk lokal di Papua. Bertambahnya penduduk Papua seiring dengan program transmigrasi di zaman Orde Baru, ternyata tidak mampu mensejahterakan orang-orang Asli Papua. Transmigrasi di Papua berhasil mengintrodusir budaya-budaya atau moda produksi ekonomi baru yang menggantikan moda produksi lama yang dipraktikkan oleh orang Papua. Program transmigrasi di Papua telah menjadi awal dari marjinalisasi ekonomi atas orang-orang asli Papua. Ketimpangan ekonomi yang dihasilkan oleh proyek transmigrasi menghasilkan diskriminasi kepada orang-orang Papua asli dalam bidang usaha-usaha perekonomian. Demmikianlah yang dialami mama-mama Papua yang harus rela berjualan beralaskan karung di depan kios-kios besar para pendatang di Papua. Tujuan penulisan artikel ini akan memberikan gambaran marjinalisasi ekonomi yang dibidani oleh proyek pembangunan neoliberal di Papua.

Kata kunci: Pembangunan Neoliberal, Orang Papua, Marjinalisasi Ekonomi.

PENDAHULUAN

Orang Papua yang hidup dengan segala kekayaan sumber daya alamnya, kini menderita di negerinya sendiri. Harga diri untuk memanfaatkan segala kekayaan yang berlimpah-limpah hingga ratusan generasi mendatang secara “merdeka”, ternyata tidak dinikmatinya, sebab telah dan sedang dieksploitasi, dinikmati serta lebih dapat memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi pendatang Jawa, Bugis, Buton, Makassar, Toraja, Manado, dan Maluku (Samuel, 2013: 56). Begitulah sekelumit realitas yang digambarkan Samuel Asse Bless¹ dalam buku “100 Orang Indonesia Angkat Pena Demi Dialog papua”.

Dalam bingkai nusantara (NKRI) Papua adalah bagaian Paling Timur wilayah Indonesia. Papua sejak lama dilirik sebagai wilayah yang subur dan melimpah sumberdaya

¹ Pendiri Yayasan OYO Papua, Sorong.

alamnya. Realitas inilah yang membuat rezim orde baru, dalam wacana pembangunan di Indonensia menjadi lahan basah untuk mengeruk pundi-pundi “rupiah”. Wacana pembangunan atas Papua tidak asing lagi didengar bahkan mungkin untuk orang Papua itu sendiri. Pembangunan selalu dikaitkan dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Demi terealisasinya, segala upaya akan dilakukan Negara. Dari deregulasi peraturan-peraturan yang dianggap menjadi batu sandung pertumbuhan ekonomi sampai dengan pengeralahan alat kekuasaan negara seperti kepolisian dan tentara untuk melindungi investasi ekstraktif seperti pertambangan yang, pada banyak kasus, sering berkonflik dengan masyarakat. Hal tersebut memang sangat mencirikan era neoliberal, dimana kebebasan individu di taruh di aras paling atas². Pemerintah pada praktiknya selalu berupaya mencapai pertumbuhan ekonomi dengan cara meliberalisasi pasar dan menggenjot sektor pembangunan infrastruktur. Contohnya pemerintah Indonesia saat ini yang menempatkan infrastruktur sebagai *leading sector*. Pembangunan infrastruktur terus digenjot dengan dalil pemerataan pembangunan. Pemerintah Indonesia melalui nawacitanya berkomitmen “membangun Indonesia dari pinggir”.

kosakata pembangunan menjadi surga telinga. Pembangunan diimajinasikan membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat dan sekaligus mengangkat harkat martabat keluarga. Tentu dengan konstruksi semacam itu, masyarakat dengan hati lapang menerima apa-apa saja yang disodorkan pemerintah. Di banyak tempat dimana proyek-proyek serupa dilaksanakan pemerintah, bukannya membawa kesejahteraan dan kemaslahatan, sebaliknya malah membawa kesengsaraan dan menggali lebih dalam jurang ketimpangan. Seperti halnya di Papua, keterbukaan akses pasar neoliberal memberikan peluang bagi para kapitalis untuk masuk ke sana demi mengakumulasi kapital. Ketidaksiapan masyarakat Papua mengikuti arus pembangunan membuat mereka termarjinalkan diranah-ranah produksi ekonomi.

Upaya pembangunan ini memang sudah digagas secara masif pada masa Orde Baru dimana upaya menggenjot pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dilakukan salahsatunya melalui program transmigrasi. Upaya transmigrasi ini merupakan gagasan yang didukung penuh oleh Bank Dunia saat itu. Harapannya bahwa, orang-orang di Papua sebagai wilayah tujuan transmigrasi bisa belajar banyak dari orang-orang di luar Papua, seperti Jawa, Lombok dan Bali yang dipandang lebih baik etos kerjanya. Dengan masuknya program transmigrasi ke Papua, bersamaan pembangunan infrastruktur jalan yang digunakan orang-orang Papua dan pendatang dari luar. Pembangunan infrastruktur ini memudahkan hilir mudik desa ke kota juga

² Untuk Lebih jelasnya lihat David Harvey.2009.Neoliberalisme dan Restorasi Kelas Kapital.Yogyakarta.ResistBook.

sebaliknya. Keterhubungan ruang menciptakan pola sosial ekonomi baru yang meng-gembleng budaya lama orang-orang Papua. Namun, ironisnya, program transmigrasi di Papua tidak membawa hasil yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi secara kualitatif. Justeru sebaliknya telah menciptakan disparitas ekonomi antara penduduk asli Papua dan mereka yang datang melalui program transmigrasi dan yang datang setelahnya.

Disparitas ekonomi merupakan jawaban dari gagalnya pemerintah menciptakan pemerataan di Papua. Masyarakat Papua yang masih sebagian besar penduduknya mempraktikkan cara produksi tradisional—subsisten—langsung dikagetkan dengan datangnya budaya baru dari luar. Di Manokwari, Papua Barat misalnya, sektor-sektor ekonomi informal telah dikuasai sebagian besar oleh pendatang yang sebagian besar berasal dari Sulawesi, Jawa, Maluku dan sebagian daerah lainnya. Di Manokwari, seperti kita lihat sekarang ini, banyak dari mereka, mama-mama Papua, masih menggelar dagangan hasil buminya beralas karung.

Ketimpangan ekonomi di Papua memang tidak lain dibidani oleh kebijakan neoliberal Orde Baru. Akibatnya adalah, mobilisasi ekonomi neoliberal yang semakin deras, didukung dengan akses jalan yang sudah menembus batas-batas dalam permukiman orang asli Papua. Suasana itu menciptakan kapital yang menggurita sampai pada ruang-ruang kehidupan masyarakat dan menarik mereka pada dunia keterbukaan dimana mereka sendiri, orang Papua, belum bisa mengikuti ritme dari gejala arus neoliberal tersebut. Akibatnya, kapital-kapital terus melakukan penetrasinya ke wilayah-wilayah baru dan mereproduksi kantung-kantung akumulasi dan mereproduksi ruang-ruang konsumsi baru sebagai jalan mereka mengukumulasi kapital lebih besar.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini secara metodologis tidak berangkat dari studi lapangan, melainkan berasal dari riset kepustakaan atau sering disebut studi pustaka. Metode penelitian ini merupakan kegiatan yang terdiri atas pembacaan, pencatatan dan menganalisis bahan-bahan penelitian yang fokus membicarakan isu tertentu. Pada artikel ini, penulis mencoba membangun argumentasi mengenai kondisi sosio-ekonomi orang Papua dampak dari program transmigrasi.

Pembahasan

1. Dinamika Perubahan Sosial Budaya di Papua: Dimulainya Program Transmigrasi

Handono Kusumo (2012) mengatakan, bahwa kehidupan ekonomi masyarakat Manokwari hingga awal abad ke-20 terutama bertumpu pada sektor pertanian tradisional dan perdagangan pertukaran (barter), disamping berburu, mencari ikan, dan mengumpulkan hasil hutan. Sistem

pertanian tradisional yang dikenal adalah bercocok tanam di ladang secara berpindah-pindah. Di manokwari, ladang atau kebun-kebun orang Numfor dan sebagian orang Arfak terdapat di dataran-dataran pantai perbukitan dan celah-celah pegunungan. Demikian juga orang Amberbaken. Sementara orang Kebar dapat bercocok tanam pada lahan-lahan kebun yang lebih luas dan lebih datar. Komoditi tanaman mereka ini didominasi oleh sayur-sayuran, pisang, keladi dan terutama ubi (ubi jalar dan ketela). Di samping itu, tebu dan beberapa jenis buah-buahan juga ditanam. Hasil pada umumnya hanya untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari (subsistem), mengingat luas lahan yang diusahakan juga tidak besar. Kemudian jika ada kelebihan produksi, barulah dijual atau ditukarkan dengan bahan makanan lainnya yang dibutuhkan, terutama ikan dan daging. Untuk memenuhi kebutuhan ikan, kebanyakan penduduk pantai dalam mencari ikan masih menggunakan cara-cara yang sangat tradisional yaitu dengan tombak atau kail (alat pancing). Hasil yang diperoleh pun hanya cukup untuk dikonsumsi sendiri. Kemudian bagi pemenuhan kebutuhan daging, para pemburu binatang liar biasanya menggunakan busur dan panah, tombak, atau jerat, untuk memperoleh binatang buruannya, seperti kasuari, kangguru dan babi hutan.

Selain mengenal tanaman palawija dan sayuran, orang Amberbaken telah menanam padi sejak lama. Padi-padi ini mereka tanam dengan jumlah yang cukup besar di kebun-kebun miliknya. Di seluruh Nieuw Guinea pada masa itu, satu-satunya wilayah di bawah *onderafdeling* Manokwari yang telah dikenal sebagai penghasil padi (beras) adalah Amberbaken. Bahwa beberapa abad lalu, menurut cerita, saat perjalanan panjang menuju Tidore dengan misi membawa upeti kepada Sultan, salah satu orang Halifur yang menyertai suku Numfor membawa kembali segenggam padi dan ditaburkan ketika telah kembali ke Amberbaken (Ooster-zee, 1906:143; Handono Kusumo, 2012).

Kebiasaan orang Papua berburu, meramu, dan berladang dengan cara subsisten seiring waktu berubah karena pengaruh datangnya modernisasi. Fenomena modernisasi ini dimulai sejak datangnya rezim kolonial dan berlanjut paska kemerdekaan Republik Indonesia dan dan memuncak setelah naiknya Suharto pada tampuk kekuasaannya.

Rezim Orde Baru mulai secara bertahap mengadakan program transmigrasi ke Irian Jaya tahun 1984. Diperkirakan jumlahnya adalah sebanyak 138.000 keluarga, atau 700.000 orang untuk REPELITA IV (1985-1989). Tetapi, jumlah yang sungguh-sungguh sampai ke Irian Jaya hanyalah 272.320. Program ini terbukti sangat mahal karena buruknya infrastruktur, yang menjadikan sebab meningkatnya subsidi buat para petani. Realitas itu semakin memburuk dikarenakan mahalnya biaya transportasi ke pasar-pasar dan rendahnya permintaan pasar terhadap komoditi pertanian yang dihasilkan.

Transmigrasi merupakan Proyek pemindaham penduduk sebagai bagian dari proyek pertanian yang dibiayai Bank Dunia antara tahun 1976 dan 1986, Bank Dunia mengucurkan pinjaman 630 juta dolar AS untuk menopang proyek yang paling ambisius di dunia: Transmigrasi Indonesia. Tujuannya adalah memindahkan orang-orang dari daerah berpenduduk padat seperti Madura, Bali, Lombok dan Jawa yang notabeneanya miskin secara ekonomi ke pulau-pulau seperti Kalimantan, Irian Jaya, dan Sumatra. Program ini, menurut Bank Dunia, dilaksanakan atas dasar untuk mengatasi ledakan penduduk dan pengangguran di Jawa, Madura, Bali dan Lombok dan pulau-pulau padat lainnya. Transmigrasi juga menjadi alasan untuk memicu pembangunan ekonomi di daerah tujuan (Rich, 2000: 45-46).

Ndoen, 1994; Sri Nuraini Kartika Sari dkk, (2012: 658) mengatakan bahwa program transmigrasi ini intinya merupakan upaya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, sosial dan kemandirian. Gelombang-gelombang migrasi spontan yang datang semakin cepat (meningkat dengan jumlah yang diperkirakan mencapai 300.000 sampai 400.000 orang pada tahun 1985) program transmigrasi ini bertahap dan juga bertujuan memukimkan kembali masyarakat Papua. Aspek terakhir ini terutama bertujuan untuk merangsang integrasi ekonomi orang Papua dan untuk “meperadabkan” kelompok-kelompok yang dianggap sebagai “masyarakat tertinggal”. Sasaran program transmigran adalah di sekitar marauke, Manokwari, Paniai dan Timika.

Menurut laporan Yayasan Pengembangan Masyarakat Desa di Irian Jaya (YPMD Irja) program-program ini bermasalah terkait kurangnya koordinasi antara ketiga departemen yang bertanggung jawab: Kementrian Dalam Negeri, Kehutanan dan Sosial (YPMD, 1985; Pouwer, 1999:173-174; Sri Nuraini Kartika Sari dkk, 2012: 658-659). YPMD menyimpulkan bahwa program ini gagal dalam memperhitungkan dinamika sosial budaya setempat, yang mendorong kemarahan antara orang Papua yang kehilangan lahan pertanian dan lahan berburu tanpa ada kompensasi.

Program transmigrasi ini sangat berkontribusi merubah tatanan kehidupan sosial ekonomi orang Papua. Hal tersebut disebabkan pertemuan dua kultur yang berbeda antara penduduk asli dan pendatang. Dalam tulisannya, Sri Nuaraini Kartika Sari dkk mengatakan, bahwasanya tujuan pemerintah mengadakan program tersebut berorientasi ekonomi. Orientasi pembangunan yang berbeda antara pemerintah dan masyarakat menyebabkan konflik dikemudian hari. Hal itu dapat kita lihat setelah bebrapa dekade setelahnya, di Papua, banyak terjadi konflik antar pendatang dan penduduk asli yang memang dilatar belakangi oleh ketimpangan ekonomi.

Dikatakan Richard Robison (2012) bahwa kebijakan ekonomi setelah kejatuhan Sukarno membentuk basis filsafat ekonomi pasar bebas, lebih sekedar pembenahan segera terhadap dilema fiksial dan moneter Indonesia pada pertengahan 1960an. Hal ini merupakan basis yang diperlukan bagi rehabilitasi, penguatan dan ekspansi dari susunan masyarakat kapitalis yang ada serta bertahan hidupnya kelas-kelas yang dominasinya terutama dalam kerangka hubungan sosial dan politik yang ada. Dengan kata lain, kebijakan itu bukan dipilih karena mereka menjanjikan pertumbuhan teratur, melainkan pada soal sosial dan ekonomi yang dapat diterima oleh penguasa politik baru Indonesia. Teori pertumbuhan ekonomi dan modernisasi yang menjadi anak kandung dari ideologi “pembangunan” menyimpulkan bahwa masyarakat Indonesia saat itu memang berada pada tingkat subsistem tradisional. Masyarakat Indonesia masih memerlukan tuntunan dan santunan yang ketat dari para pemasok modal dan negara-negara industri.

Dikatakan Baswir (2003: 214-215) bahwa logika pembangunan neoliberal Orde Baru sangat pro pertumbuhan. Hal tersebut ditempuh untuk memperbesar kue pembangunan, pertumbuhan harus dilakukan mendahului pemerataan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa aturan dasar kaum neoliberal adalah “liberalisasikan perdagangan dan finansial, biarkan pasar menentukan harga, akhiri inflasi, (stabilisasi ekenomi makro dan privatisasi)” dan kebijakan pemerintah haruslah “menyingkir dari penghalang jalan” (Chomsky, 1999; Fakhri, 2009: 194).

2. Lonjakan Penduduk dan Ketersingkiran Orang-Orang Papua

Pertumbuhan penduduk di Papua dan Papua Barat dikatakan Ismail Suardi Wekke (2017) berasal dari program transmigrasi, kebutuhan daerah akan tenaga profesional asing dan perpindahan penduduk yang berasal dari pulau lain di Indonesia seperti suku bangsa Bugis dan Madura. Walaupun bukan mayoritas, kedua suku bangsa ini memainkan peran yang signifikan menggerakkan perekonomian, tidak saja di perkotaan tetapi sampai pedalaman. Di daerah-daerah pelosok mereka mendistribusikan barang dengan menyediakan barang kebutuhan hidup sehari-hari.

Dipadatnya Tanah Papua oleh orang-orang dari luar Papua seperti Jawa, Makassar, Madura dll., ternyata tidak membawa dampak yang cukup baik untuk perekonomian orang Papua. Sebaliknya, seperti yang dikatakan Widjojo dkk (2009: 17) bahwasannya, gelombang penduduk dari luar justru menghadirkan marjinalisasi pada orang Papua dilihat dari aspek demografi, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya. Pada aspek demografi, jumlah orang Papua asli mengalami penurunan sebagai akibat membanjirnya pendatang dari luar baik berupa transmigrasi maupun migrasi. Realitas ini sering dikatakan sebagai Fenomena

displacement orang asli Papua. Pada 1959 presentase pendatang masih kurang dari 2% menjadi 4% pada 1971, dan menjadi lebih dari 35% pada 2000. Dan pada 2005 diperkirakan penduduk pendatang menjadi 41% dan melonjak menjadi 53,5% pada 2011. Dilanjutkan oleh Wonda (2009) bahwa kesenjangan ekonomi di Papua Barat dapat dilihat secara faktual. Rakyat Papua dalam semua dimensi kehidupan sosial berada di bawah tekanan dari berbagai taraf kehidupan karena warga pendatang yang berada di Papua Barat lebih mendominasi. Rakyat Papua merasa bahwa mereka hidup di atas tanah leluhur dan nenek moyangnya sendiri, namun secara ekonomi, politik, serta penguasaan dalam pekerjaan-pekerjaan teknis berada di tingkat paling bawah ketersingkirkan (pemarginalan).

Theo van Den Broek, 2006:11 dalam Wonda (2009: 106) mengatakan bahwa, disparitas ekonomi itu sendiri merupakan suatu kondisi yang sangat rawan karena menyangkut suatu kebutuhan yang sangat mendasar. Jika pemenuhan kebutuhan itu terancam atau dipersulit, suatu reaksi emosional dapat muncul dengan mudah". Seiring dengan warga pendatang yang semakin banyak di Papua, dan akses yang dimiliki di seluruh lini perekonomian dikuasai oleh para pendatang maka yang disebut dengan kesenjangan itu semakin meruncing. Padatnya warga pendatang yang kemudian akan menguasai seluruh dasar membuat rakyat Papua berada dalam kondisi yang sangat memprihatikan dan dalam tataran ancaman serius.

Taraf kehidupan orang Papua Barat dengan non Papua terbentang perbedaan yang cukup mendasar, yaitu: secara ekonomi orang pendatang lebih maju dari pada orang Papua pribumi. Dalam berbagai hal ada beberapa indikator orang Papua berada ditingkat paling bawah hal ini dapat dilihat:

1. Dalam proses pemberdayaan, orang Papua asli masih dipandang rendah. Pemerintah daerah memberikan sikap yang kurang percaya. Oleh sebab itu, pemerintah tidak memberikan kepercayaan dalam pengelolaan proyek-proyek berniali miliaran. Proyek-proyek besar lebih dipercayakan kepada pendatang, sementara para penguasa Papua pribumi sangat sedikit, bahkan mungkin hanya pada nilai proyek di tingkat ratusan juta.
2. Pemilik perusahaan, toko-toko di Papua 100% dimiliki warga pendatang, sementara orang Papua asli sama sekali nihil. Orang Papua mayoritas konsumtif dibanding menjadi penawar pasar. Disinilah orang Papua asli dinilai tidak bisa maju dalam dunia usaha.
3. Mayoritas bangsa Papua berada di bawah garis kemiskinan di atas tanahnya sendiri. Orang asli Papua lebih banyak hidup dipinggiran kota karena disingkirkan oleh

penguasa dan pengusaha yang memiliki modal dan yang lebih mayoritas di daerah-daerah pedalam Papua.

4. Keterlibatan pengusaha Indonesia terhadap kemajuan orang Papua tidak ada, misalnya setelah membuka ruko, dan toko-toko besar, ternyata mereka, para pemilik toko, membawa tenaga kerja dari Jawa, dll. Sementara orang-orang Papua tidak dilibatkan dalam sebuah usaha yang dibangun di atas lahan dan tanahnya orang Papua itu sendiri. (Wonda, 2009: 107).

Menurut hasil penelitian LIPI (2004), disparitas ekonomi dan pembangunan antara Papua dengan daerah-daerah lain di Indonesia tidak terlepas dari adanya eksploitasi budaya dan Sumber Daya Alam Papua, diskriminasi kebijakan pusat kepada daerah serta terjadinya konflik kepentingan para pendatang di Tanah Papua. Otsus tidak menjamin terciptanya kesejahteraan dan pembangunan ekonomi untuk orang Papua. Seiring dengan rendahnya pertumbuhan ekonomi pada saat Otonomi Khusus diimplementasikan, jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan juga meningkat. Dari 2.556.419 orang penduduk Papua pada tahun 2004, jumlah penduduk miskin mencapai 43% (BPS Papua, 2006 dalam Widjojo dkk, 2009: 14) data BPS Provinsi Papua (2006), sebagaimana dikutip oleh hasil penelitian LIPI (2006), menunjukkan bahwa jumlah penduduk asli Papua 1.460.846 orang pada tahun 2006. Realitas statistik ini menunjukkan bahwa adanya marjinalisasi ekonomi yang dirasakan oleh penduduk asli Papua. Sebagai buktinya, pada tahun 2003, kota-kota provinsi, kabupaten, dan kota dihuni oleh pendatang (90%) yang menguasai sebagian besar (90%) perekonomian, perdagangan, tenaga kerja, transportasi, kantor-kantor swasta, dan bisnis lainnya (Kompas, 2003; Widjojo dkk, 2009: 14-15).

Partisipasi orang Papua asli dalam dunia bisnis sangatlah lemah. Tanpa keahlian, modal usaha, jaringan sosial yang luas, atau sumber daya lainnya yang diperlukan, mustahil bagi siapa pun untuk memasuki arena pertarungan ini, apalagi memenangkannya. Ketidakadilan struktural telah dialami oleh orang asli Papua. Orang Papua pada umumnya merasa “dirampok kekayaan alamnya seperti tanah, tersingkir dari hak untuk memperoleh pekerjaan, tak berdaya untuk bersaing, cemburu atas kemajuan orang lain. Kelemahan dalam hal sumberdaya, persaingan di dunia usaha menghasilkan situasi yang diskriminatif bagi orang asli Papua. Situasi ini berkaitan langsung dengan penguasaan sumberdaya oleh orang asli Papua yang rendah. Khusus dalam dunia usaha, sumberdaya itu berupa modal, kemampuan manajerial, koneksi, produksi dan jaringan Pasar (Widjojo dkk, 2009: 79)

Tersingkirnya orang-orang Papua secara massif dalam bidang ekonomi, secara kasat mata memang diawali dengan program neoliberalisme Orde Baru melalui transmigrasi yang

didukung sepenuhnya oleh Bank Dunia. Masyarakat Papua yang pada dasarnya masih menganut corak produksi tradisional, mau tidak mau diseret oleh tangan-tangan tak terlihat kapital untuk masuk ke dalam lingkaran pasar neoliberal. Hal itu bukan tanpa risiko, karena pada realitasnya, orang Papua harus menerima kenyataan bahwa mereka kalah secara ekonomi dengan para pendatang yang sukses di Papua.

Marthinus (2012: 81) mengatakan, keterbelakangan dan marjinalisasi terhadap orang-orang Papua juga tidak lain disebabkan rendahnya pendidikan, skill dan juga modal kapitalnya. Berbeda dengan para transmigran dari daerah-daerah lain, yang berbeda suku dan agama, yang pada saat pemerintahan Orde Baru, mereka disubsidi oleh pemerintah pusat.

Kekalahan demi kekalahan karena belum siapnya orang-orang Papua ini, menciptakan disparitas ekonomi antara Papua asli dan pendatang. Fenomena ketimpangan tersebut dapat kita saksikan di pasar-pasar tradisional di Manokwari. Kristofel Maikel Ajo (2016) dalam tulisannya mengatakan, bagi orang Papua pasar bukanlah bagian dari *state of nature* kebudayaan Papua, karena pasar bukan menjadi tujuan dan tumpuan hidup mereka untuk memperoleh keuntungan. Artinya pasar belum menjadi bagian yang melekat secara kultural dalam kehidupan masyarakat, tidak seperti masyarakat pendatang di Papua. Karena itu, fungsi pasar tidak kelihatan di dalam kehidupan orang Papua sebagaimana juga terjadi di beberapa wilayah Indonesia di abad keenam belas dan abad ketujuh belas.

Dilanjutkan oleh Kristofel Maikel Ajo bahwa di Manokwari, pengusaha Bugis-Makassar memegang peranan dari konstruksi bangunan sampai dengan penjualan pinang yang dulunya dijual oleh penduduk Papua asli. Pendatang lain secara proporsional (merata) menduduki jabatan-jabatan struktural maupun fungsional di pemerintahan. Realitas ini tidak hanya terjadi di Manokwari tetapi juga dapat dijumpai di Sorong, Timika, dan Jayapura sebagai wilayah-wilayah yang selalu didatangi orang-orang dari luar Papua dengan alasan mencari kehidupan ekonomi. Senada dengan itu, Yoman (2013) mengatakan bahwa penduduk asli Papua benar-benar tersingkir dan termarjinalkan. Terbukti bahwa di seluruh tempat-tempat strategis seperti mall, toko-toko besar dan pasar-pasar dikuasai oleh orang-orang melayu. Mama-mama Papua berjualan di pinggir jalan, di pinggir toko dan di bawah tanah beralaskan daun-daun. Di pasar Wosi misalnya, situasi itu kentara sekali terjadi. lapak-lapak kios semi permanen hampir seluruhnya diisi oleh para pedagang pendatang yang kebanyakan berasal dari Sulawesi dan Jawa. Mereka biasanya berjualan sandang, VCD/DVD dan kebutuhan lainnya. Jika yang memiliki modal lebih besar, mereka akan bisa menyewa kios lebih permanen di pinggiran pasar. Sementara mama-mama Papua berjualan di belakang pasar dari pendatang ini (Suryawan, 2017a). kata Yoman, Tanah-tanah orang Papua asli dirampas untuk kepentingan

pembangunan seperti: pemukiman transmigrasi, lahan kelapa sawit, membangun infrastruktur TNI dan POLRI, membangun kantor-kantor pemerintah, toko-toko megah, Mall-mall megah, dan Super Market Megah.

Dalam Suryawan (2017a), pada saat mengunjungi sebuah kampung di distrik Oransbari, kabupaten Manokwari selatan, Provinsi Papua Barat, dia menyasikan kondisi yang sangat ironis. Kondisi itu kata dia, berhubungan dengan fragmen-fragmen ketersingkirkan orang Papua di tanhnya sendiri. Kondisi yang dilihatnya menjadi semakin *ajeg* ketika investasi global dan nilai-nilai baru semakin mendesak masyarakat lokal ke wilayah pinggiran dan pada akhirnya menyisihkan mereka. Kata Suryawan ketika mengunjungi distrik untuk bertemu dengan kepala kampung, ia melewati ruas-ruas jalan yang membelah perkebunan sawit. Dalam perjalanan di tengah hamparan kebun sawit itu, dia melihat jejeran rumah penduduk asli Papua yang sangat sederhana dan jauh dari keramaian. Mereka hidup di tengah perkebunan kelapa sawit yang sayangnya tidak lagi menyambung hidup mereka. perusahaan kelapa sawit tersebut sudah lama tidak beroperasi. Masyarakat Papua yang dulunya ‘dipaksa’ oleh perusahaan berkebun kelapa sawit kini harus gigit jari karena perusahaan tersebut tidak lagi membeli hasil sawit mereka. Kasus ini hampir sama dengan suku Marind Anim, Papua³.

Dengan pengetahuan dan budaya sebagai masyarakat yang masih subsistem, sangat memberatkan orang-orang Papua untuk memiliki daya saing di daerahnya sendiri. Menggurutanya kapitalisme dalam era neoliberal menyokong penetrasi kapital ke dalam jantung-jantung kehidupan orang Papua. Akibatnya terjadi sebuah komodifikasi subsistem pada orang Papua. Orang-rang Papua dipaksa dari sebelumnya bertahan hidup sebagai petani subsistem lambat laun tanpa mereka sadari menjadi produsen komoditas untuk sekedar memenuhi kebutuhan dan/atau memenuhi keinginan mereka.

3. Papua dalam Arus Neoliberalisme

Zaman neoliberalisme saat ini merupakan zaman dimana kapital-kapital terus melakukan ekspansi ruang ekonomi baru guna menciptakan pola-pola konsumsi baru di masyarakat. Ekonomi neoliberal ini menjadi penyebab ketidak merataan pembangunan dan menciptakan sebuah ruang yang berbeda, seperti desa-kota. Dikatakan Harvey (2010), bahwa dalam perbedaan desa-kota adalah akibat dari proses-proses pertukaran yang terjadi di atas ruang. Aktivitas kapitalis menghasilkan pembangunan geografis yang tak seragam, bahkan meski tak ada perbedaan geografis dalam hal sumber daya dan kesempatan-kesempatan fisik yang merupakan faktor bagi munculnya logika diferensiasi dan spasialisasi regional. Akibat

³ Untuk penjelasan lebih lengkapnya, baca Laksmi Savitri.2013. Korporasi dan Politik Perampasan Tanah

kompetisi, kapitalis-kapitalis individual mengejar keuntungan kompetitif dengan memanfaatkan struktur spasial ini dan karena itu cenderung untuk tertarik atau terdorong untuk bergerak ke lokasi-lokasi dimana biaya-biayanya lebih rendah atau tingkat labahnya lebih tinggi. Dikatakan Harvey, bahwa proses-proses akumulasi kapital selalu berekspansi dan karenanya bersifat mengganggu setiap tendensi ke arah terbentuknya keseimbangan. Sebagaimana teori lokasi klasik, mendefinisikan apa yang disebut sebagai “radius spasial dari barang” (*the spatial range of a good*) dalam artian jarak radius dari suatu titik produksi dimana harga pasar (yang diukur sebagai biaya produksi plus biaya transportasi) membuat barang yang diproduksi berada di luar kesediaan atau kemampuan konsumen untuk membayarnya. Namun, barang-barang tidak sendirnya pergi kepasar, tetapi dibawa oleh para pedagang. Kapitalis-kapitalis ini kata Harvey, memiliki peran historis mengenai soal tembus-menembus secara terus-menerus hambatan-hambatan spasial, membuka kesempatan gerak dan ruang-ruang perdagangan yang baru.

Papua di bawah kepemimpinan prsesiden Soeharto dapat dikatakan terlupakan dan jauh dari kata sejahtera. Meskipun telah memainkan strategi dengan pemanfaatan berbagai program pembangunan ekonomi namun tetap saja mengalami kesulitan saat merangkul Papua (McGibbon, 2006:15 dalam Luthfia, 2016). Masalahnya adalah berbagai kebijakan pembangunan ekonomi tersebut kerap dilakukan setengah hati dan tidak mampu menyentuh akar permasalahan yang ada. Praktik ini dilakukan hampir seluruh wilayah Indonesia. Hasilnya ketimpangan semakin melebar. Praktik pemerintahan sentralistik ini sekadar menyedot hasil bumi dan kekayaan dari penjuru wilayah-wilayah yang kaya sumberdaya tanpa menciptakan efek menetes ke bawah (*trckle down effect*) kesejahteraan yang adil kepada wilayah tersebut. Pemikiran dasar ekonomi pembangunan nasional Orde Baru ini dikenal sebagai “Trilogi Pembangunan” yang secara konseptual memiliki tujuan mulia yakni menginginkan pemerataan ekonomi ke seluruh rakyat Indonesia. Dengan terciptannya kesejahteraan, maka secara logis tercipta stabilitas ekonomi dan politik. Habibie (2006:268 dalam Rizka, 2016: 258) mengatakan sejatinya program ekonomi Orde Baru memiliki tujuan luhur. Namun, realisasinya adalah penghianatan terhadap apa yang dicita-citakan tersebut. Betapa kondisi di lapangan sangatlah jauh bertolak belakang. Ada pembagian kue pembangunan yang timpang dan tak mengemuka di masa orba.

Ditandai lewat pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, seluruh wilayah di bumi ini tidak ada lagi yang betul-betul terisolasi dari sistem ekonomi global (neoliberalisme). Perlahan, dengan pasti, tanpa terkecuali Tanah Papua menjadi bagian dari sistem ekonomi yang

berjantungkan persaingan bebas dan memberikan peluang yang besar bagi para pemilik modal ini. Masuknya ide-ide perekonomian global dalam sendi-sendi kebudayaan orang Papua

Salah satu bentuk wujud dari moderenitas tersebut adalah dalam bentuk pembangunan yang menghubungkan orang-orang dengan imajinasi serta mimpi yang berbeda-beda. Namun di sisi yang lain, komunitas-komunitas suku bangsa (sepertihalnya juga seperti Papua, red) menghadapi tantangan untuk mengambil bagian dalam perubahan sosial budaya yang berlangsung di tanah mereka. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana komunitas lokal ini dalam merespons dan menyikapi penetrasi global yang menyerang mereka. Penetrasi modal yang eksploitatif ke dalam perekonomian suku asli seringkali justru didukung oleh Negara dengan alasan ingin memajukan kaum minoritas suku asli melalui program-program perubahan sosial yang terarah (Ghee dan Gomes, 1993: 1-3 dalam Suryawan, 2017b: 90-91).

Dalam kasus Papua, program-program pembangunan telah menghubungkan berbagai macam latar belakang orang Papua dengan dunianya masing-masing. Ditengah proses inilah menjadi penting memperhatikan pergerakan orang Papua dalam dinamika pembangunan di Tanah Papua yang menentukan identitas dirinya dengan dunia global. Dalam konteks ini, memahami imajinasi orang Papua tentang diri dan lingkungannya memerlukan pemahaman tentang detail keterhubungan dan siasat-siasat mereka dalam merespon pembangunan dalam bentuk berbagai macam program tawaran 'pemberdayaan' yang dilakukan oleh Negara (Suryawan, 2017b: 93).

Fenomena di tanah Papua adalah interkoneksi lokal dan global menimbulkan fragmentasi di tengah masyarakat. Hal ini salah satunya karena digugatnya nilai-nilai lama yang sebelumnya menjadi pondasi integrasi dan solidaritas sosial oleh nilai-nilai baru yang hadir akibat pengaruh global dan moderenitas. Pegangan komunitas pun menjadi luntur ketika anggota masyarakatnya mulai terpengaruh dan mempraktikkan nilai-nilai baru yang seringkali berbenturan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai lama. Keberagaman etnik dan budaya yang tinggi di Papua juga sangat mempengaruhi bagaimana respon masyarakat (dengan nilai-nilai lama mereka) terhadap hal-hal baru yang kehadirannya dinitroduksi oleh pemerintah, agama dan sudah tentu kuasa investasi global dalam bentuk investasi dan perusahaan-perusahaan yang tumbuh subur di setiap jengkal tanah Papua (Suryawan, 2017b: 102).

Ekspansi sistem produksi kapitalis melalui transmigrasi di Tanah Papua telah berhasil menciptakan ruang-ruang ekonomi baru. Sistem kapitalisme memang membutuhkan ruang baru untuk memecahkan kebuntuan *over accumulation*-nya. Jadi, untuk itu, sistem kapitalisme memerlukan rorganisasi ruang (*spatial reorganization*) yang khusus agar sistem produksi yang bercorak produksi kapitalis bisa meluas secara geografis (*geographic expansion*). Istilah

yang dimaksudkan di sini lebih luas maknanya dari istilah yang disebut pemerintah sebagai “penataan ruang”. Secara umum, yang dimaksudkan dengan istilah ruang dalam “reorganisasi ruang” disini mencakup: (a) ruang imajinasi dan penggambaran, termasuk perancangan tenokratik yang diistilahkan *master plan, grand design*, dan sebagainya; (b) ruang material, tempat dimana kita hidup; dan (c) praktik-praktik keruangan dari berbagai pihak dalam membuat ruang, memanfaatkan ruang, memodifikasi ruang, dan melenyapkan ruang, dalam rangka berbagai upaya memenuhi keperluan, termasuk mereka yang berada dalam posisi sebagai bagaian Negara, atau korporasi, atau rakyat (Fauzi, 2017: 17).

Reorganisasi ruang dilakukan terus-menerus oleh kekuatan yang bermaksud melipatgandakan keuntungan perusahaan-perusahaan kapitalis. Keuntungan itu pada dasarnya diperoleh dari privatisasi tanah dan sumber daya alam, pemisahan antara penghasil dan pemilik barang yang dihasilkan, dan eksploitasi tenaga kerja untuk menghasilkan barang dagangan yang bernilai tambah. Oleh sistem produksi kapitalis itu ditransportasikan sedemikian rupa mulai dari tempat ia diproduksi hingga diperdagangkan dan dikonsumsi rakyat, baik untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun melayani kebiasaan berbelanja (Budaya konsumtif) (Fauzi, 2017: 18).

Reorganisasi ruang hidup masyarakat Papua melalui transmigrasi tak lain merupakan dorongan dari tangan-tangan tak terlihat liberalisme. Konsekuensi dari itu semua adalah marjinalisasi ekonomi atas orang-orang Papua di tanahnya sendiri. Memang, sejak 1970-an, ekonomi dunia kapitalis mengalami sebuah proses perubahan mendalam yang secara umum disebut sebagai globalisasi. Posisi penting dan makna globalisasi yang terjadi sekarang, serta alasan dan dampaknya, masih sangat kontroversial. Dalam arti terluasnya, globalisasi mengacu pada beberapa bentuk baru restrukturasi kapital pada skala dunia dan meliputi beberapa unsur berikut:

- Deregulasi pasar finansial dan “finansialisasi” semua aspek kegiatan ekonomi;
- Semakin meningkatnya deregulasi dalam perdagangan internasional;
- Pergeseran dalam hal produksi, serta strategi dan teknologi penjualan yang digunakan oleh korporasi agribisnis dan manufaktur; dan
- Hadirnya banyak kemungkinan baru dari perkembangan teknologi informasi, termasuk kemungkinan untuk mengatur kegiatan ekonomi (produksi dan pemasaran) dan dalam komunikasi masa. (Henry Bernstein, 2010: 79)

Era globalisasi atau neoliberal saat ini begitu terasa di Tanah Papua. Orang-orang Papua yang dulunya masih menggunakan cara produksi tradisional dalam sistem ekonominya, seperti

bater, lambat laun tanpa mereka sadari ditarik ke dalam pusaran ekonomi pasar kapitalis. Bagian dominan yang dimainkan oleh pasar dalam ekonomi kapitalis bersama dengan kepentingannya, secara bertahap merubah prinsip barter atau pertukaran di dalam sistem ekonomi tradisional.

Barter, pengangkutan, dan pertukaran pada prinsipnya adalah tingkah laku ekonomi yang efektivitasnya bergantung pada pola pasar. Sebuah pasar adalah tempat pertemuan dengan tujuan barter, membeli atau menjual. Jika pola semacam itu tidak hadir, paling tidak sebagian darinya, kecenderungan untuk melakukan barter tidak akan melakukan cakupan yang luas. Pola tersebut tidak bisa menghasilkan harga. Karena sama seperti resiprositas dibantu oleh sebuah pola pengaturan yang simetris—setara, karena redistribusi dipermudah oleh sentralisasi dalam derajat tertentu, dan kerumahtanggaan harus didasarkan pada autarki, maka efektivitas prinsip barter juga pada pola pasar. Namun dengan cara yang sama di mana baik resiprositas, redistribusi, atau kerumahtanggaan mungkin muncul di dalam sebuah masyarakat tanpa harus menjadi kelaziman di dalamnya, prinsip barter mungkin mendapat tempat yang subordinat di dalam sebuah masyarakat di mana prinsip-prinsip lain memiliki pengaruh yang kuat.

Bagaimanapun juga, dalam beberapa hal yang lain prinsip barter tidak benar-benar sama dengan tiga prinsip yang lain. Pola pasar, yang terkait dengan prinsip barter, lebih spesifik dibandingkan baik dengan simetris, sentrisitas atau autarki—yang, berkebalikan dengan pola pasar, hanyalah merupakan “sifat-sifat”, dan tidak menciptakan institusi-institusi yang dirancang hanya untuk menjalankan satu fungsi. Simetri tidak lebih dari sebuah penataan sosiologis, yang tidak mampu memunculkan institusi-institusi tersendiri, namun hanya mengikuti pola-pola yang sudah ada (apakah sebuah suku atau sebuah desa secara simetris mencontoh atau tidak, tidak terkait dengan institusi yang unik). Sentrisitas, meski sering menghasilkan institusi-institusi yang unik, tidak membutuhkan motif yang akan memiliki institusi yang tercipta untuk hanya menjalankan sebuah fungsi tertentu (kepala desa atau pejabat pusat yang lain mungkin memegang, misalnya, beragam fungsi politik, militer, keagamaan, atau ekonomi tanpa terkecuali). Autarki ekonomi pada akhirnya hanyalah sifat pelengkap dari sebuah kelompok tertutup yang ada.

Pola pasar, di sisi yang lain, dihubungkan dengan sebuah motif khusus yang tidak dimiliki sebuah pola yang lain, motif untuk melakukan pengangkutan dan barter mampu menghasilkan sebuah institusi khusus, yaitu pasar. Pada akhirnya, itulah mengapa kontrol terhadap sistem ekonomi oleh pasar memiliki konsekuensi yang teramat penting bagi keseluruhan pengaturan masyarakat: artinya yang dibutuhkan adalah tidak kurang dari

pengaturan masyarakat sebagai pelengkap pasar. Bukan pengaturan ekonomi yang *embedded* dalam hubungan-hubungan sosial namun sebaliknya, hubungan-hubungan sosial *embedded* dalam sistem ekonomi. Arti penting utama faktor ekonomi bagi eksistensi masyarakat mencegah tercapainya hasil yang lain apa pun. Karena sekali sistem ekonomi dijalankan di dalam institusi-isntitusi terpisah, berdasarkan motif-motif khusus dan diberi sebuah status istimewa, masyarakat kita harus dibentuk sedemikian rupa sehingga memungkinkan sistem tersebut berfungsi sesuai dengan hukum-hukumnya sendiri. Inilah arti dari pernyataan yang sering kita dengar bahwa sebuah sistem ekonomi pasar hanya bisa berjalan di dalam sebuah masyarakat pasar (Polanyi, 1957: 59-60).

Hadirnya transmigran dengan membawa seluruh pengetahuan moderennya tentang pasar, saya kira sangat berpengaruh pada perilaku ekonomi orang Papua. Masyarakat yang dulunya masih menggunakan cara-cara tradisonal, barter, dalam kehidupan sosial ekonominya mau tidak mau seiring waktu dipaksa terintegrasi dengan politik ekonomi pasar neoliberal. Sistem pasar kapitalis yang sudah matang berkat kemenangannya melawan ekonomi sosialis—kejatuhan Uni Soviet—sampai ke Papua memporak-porandakan sistem-sistem ekonomi yang lama dan menciptakan masyarakat ekonomi baru yang secara kasat mata telah menggunakan uang dalam proses pertukarannya.

Perilaku ekonomi masyarakat Papua awalnya merupakan bagian dari sisitem sosialnya. Hal itu termanifestasi pada perilaku-perilaku ekonomi tradisional seperti barter. Cara barter ini, seperti yang disebutkan Polanyi di atas merupakan perilaku ekonomi yang tidak bisa menciptakan institusi-institusi yang spesial seperti pasar hari ini. Sistem barter yang telah dipraktikkan oleh orang-orang Papua dulu, memang tidak mampu berkembang secara global seperti di era pasar neoliberal sekarang ini. Seperti pada masyarakat suku Numfor dan sebagian orang Arfak yang tinggal di dataran-dataran pantai dan bukit-bukit di sekitar wilayah Manokwari. Mereka yang dulunya mengusahakan sistem pertanian tradisional dengan bercocok tanam di ladang secara berpindah-pindah, menggambarkan sistem ekonomi yang melekat pada sistem sosialnya. Pengusahaan ladang berpindah oleh mereka pastinya masih menggunakan tenaga kerja keluarga dalam pengelolaan. Di dalam sistem tradisional semacam ini, belum ada yang namanya transaksi komersil seperti hari ini. Oleh karena itu, mereka belum terkomodifikasi secara subsistem.

Komodifikasi subsistem adalah proses dimana masyarakat diubah dari corak produksi subsistem menjadi produsen komoditas. Hal semacam ini terjadi pada masyarakat Papua asli. Hancurnya tatanan budaya lama yang seketika diganti oleh budaya-budaya baru dari luar mereka, seperti berburu meramu yang subsistem, tiba-tiba dibenturkan dengan sistem

ekonomi neoliberal yang dikirim bersamaan gelombang transmigrasi, menjerumuskan orang asli Papua ke jurang hitam kemiskinan. Hasilnya, ketidak siapan masyarakat asli Papua menghadapi gempuran sistem ekonomi pasar neoliberal tersebut, memaksa mereka menjadi kaum minoritas secara ekonomi.

Lihat saja, dibukanya permukiman-permukiman baru di Papua dan bertambahnya penduduk Papua oleh para pendatang migran, seiring waktu membentuk sebuah masyarakat dan juga menciptakan pasar sebagai ciri masyarakat modern. Dimana tempat tersebut, pasar, menjadi pusat pertukaran barang, dari dalam maupun dari luar Papua. Hadirnya pasar modern di Papua dengan kondisi masyarakat yang masih “tertinggal” menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat Papua yang tradisional. Akibat hancurnya sendi-sendi kehidupan ekonomi masyarakat, dan ketidakmampuan mereka beradaptasi secara *ajeg* terhadap sistem ekonomi neoliberal, berdampak pada kekalahan orang asli Papua.

KESIMPULAN

Pembangunan yang diupayakan melalui program-program transmigrasi di zaman Orde kenyataan tidak mampu dan bahkan gagal dalam mengangkat masyarakat Papua dari garis kemiskinan. Proyek transmigrasi dengan memukimkan orang-orang dari luar Papua, seperti Jawa, Bali dan Maudura dll., di Papua, seiring waktu bukan menghadirkan kesejahteraan pada masyarakat Papua sebaliknya membawa masyarakat Papua ke jurang disparitas ekonomi. Disparitas ini di antaranya dipicu dikuasainya sektor-sektor ekonomi oleh orang-orang dari luar Papua. Karena ketidaksiapan masyarakat Papua untuk bersaing, program transmigrasi secara bertahap merubah cara-cara produksi subsisten orang-orang Papua menuju pada tatanan ekonomi modern yang merubah sendi-sendi kehidupan ekonomi, sosial dan budaya orang papua. Terjadinya disparitas dan runtuhnya sendi-sendi kehidupan tradisonal orang Papua oleh sistem pasar modern ditandai dengan hilangnya transaksi tradisional di masyarakat, seperti barter yang digantikan transaksi ekonomi uang. Ketimpangan ekonmi ini juga dapat disangsikan di pasar-pasar tradisional di Papua, di mana mama-mama Papua harus rela berjualan beralaskan karung, di pelataran kios-kios milik masyarakat non Papua. Hal tersebut selain karena tidak memiliki modal yang cukup untuk menyewa kios-kios permanen, juga implikasi dari sistem ekonomi pasar neoliberal yang hadir bersama datangnya program transmigrasi.

DAFTAR PUSTAKA**Buku dan Jurnal:**

- Ajoi, K. M. 2016. *Kedudukan Pribumi-Pendatang di Pasar dan kantor:Konflik (HORIZONTAL) Ekonomi-Politik di Papua*.
- Ajoi, K. M. (2016). *Kedudukan Pribumi-Pendatang di Pasar dan kantor:Konflik (HORIZONTAL) Ekonomi-Politik di Papua*.
- Anderson, B. (1987, April). Indonesia: How Did The Generals Die? *Southeast Asia Program Publications at Cornell University*.
- Ar, M. (2017, November 28). *humas.id*. Retrieved Mei Minggu, 2018, from <https://www.humas.id/pembangunan-jalan-trans-papua-demi-keadilan-sosial-bagi-seluruh-indonesia/>
- Baswir, R. (2003). *Di Bawah Ancaman IMF*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Belss, S. A. (2013). Mempertegas Dialog Jakarta-Papua Dengan Instrumen "Basic Need", Interest" and "Position". In E. J. Sarapung, *100 Orang Indonesia Angkat Pena Demi Dialog Papua* (p. 57). Yogyakarta: Interfidei.
- Bernstein, H. (2010). *Class Dynamics of Agrarian Change: Agrarian Change and Peasant Study*. Canada: Fernwood.
- Fakih, M. (2009). *Buntunya Teori Pembangunan*. Yogyakarta: InsistPress.
- Fakih, M. (2009). *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: InsistPress.
- Hardiman, F. B. (2017). *Hak-Hak Asasi Manusia: Polemik dengan Agama dan Kebudayaan*. Yogyakarta: PT kamsius.
- Harvey, D. (2010). *IMPREALISME: Geneologi dan Logika Kapitalisme Kontemporer*. Yogyakarta: Resist Book.
- Herlambang, W. (2014). *Kekerasan Budaya Pasca 1965:Bagaimana Orde Baru melegitimasi Anti-Komunisme Melalui Sastra dan Film*. Jakarta: Marjin Kiri.
- Irwanto, B. (2017). *Film, Ideologi, dan Militer:Hegemoni Militer dalam Sinema Indonesia*. Yogyakarta: Warning Books.
- Julie Southwood, P. F. (2013). *Teror Orde Baru: Menyelewengkan Hukum dan Propoganda*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Kartikasari, S. N. (2012). *Ekologi Papua*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kasendra, P. (2016). *SOEHARTO:Bagaimana Ia Bisa Melanggengkan Kekuasaan Selama 32 Tahun?* jakarta: Kompas.
- Kusumo, H. (2012). Perubahan Sosial Ekonomi di Manokwari (1898 – 1962). *JURNAL ILMU SOSIAL, Volume 10, No.3, Desember 2012*, 165.
- Lestranigsih, D. (2011). *Gerwani: Kisah Tapol Wanita di Kamp Plantungan*. Jakarta: Kompas.
- Luthfia, A. R. (2016). Pergulatan Asa Di Tanah Papua: Diperjuangkan, Dilupakan dan Dirangkul kembali. In A. P. Purbokusumo, *Indonesia Bergerak 2: Mozaik Kebijakan Publik di Indonesia 2016* (p. 258). Yogyakarta: IGPA.
- Marhinus, P. (2012). *Solving Papuan Grievances: An Introduction*. Jakarta: UI-Press.

- Mariana, A. (2015). *Perbudakan Seksual: Perbandingan Antara Massa Fasisme Jepang dan Neofasisme Orde Baru*. Jakarta: Marjin Kiri.
- Marzali, A. (2015). *Antropologi dan Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Narwaya, T. G. (2010). *Kuasa Stigma dan Represi Ingatan*. Yogyakarta: RESIST BOOK.
- Noer, A. C. (Director). (1984). *Penghianatan G30S PKI* [Motion Picture].
- Pembangunan Dalam Pusaran Globalisasi. (2014). In M. Presilla, *Pembangunan Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan di Vietnam* (pp. 79-104). Yogyakarta: Ombak.
- Polanyi, K. (1957). *The Great Transformation: The Political and Economic Origins Of Our Time*. New York: Beacon Press.
- Rachman, N. F. (2017). *Panggilan Tanah Air*. Yogyakarta: Insist Press.
- Rich, B. (1999). *Menggadaikan Bumi: Bank Dunia Mepiskinan Lingkungan dan Krisis Pembangunan*. Jakarta: International NGO Forum on Indonesia Development.
- Rich, B. (1999). *Menggadaikan Bumi: Bank Dunia, Pemiskinan Lingkungan dan Krisis Pembangunan*. Jakarta: Infid.
- Robinson, R. (2012). *Soeharto dan Bangkitnya Kapitalisme Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Robison, R. (2012). *Soeharto dan Bangkitnya Kapitalisme Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Roosa, J. (2017). *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*. Temanggung: Kendi.
- Sarapung, E. J. (2013). 100 Orang Indonesia Angkat Pena Demi Dialog Papua. In S. A. Bless, *Mepertegas Dialog Jakarta-Papua Dengan Instrumen "Basic Need", "interest" and "Posistion"* (p. 57). Yogyakarta: Interfidei.
- Savitri, L. A. (2013). *Korporasi dan Politik Perampasan Tanah*. Yogyakarta: Insist Press.
- Simorangkir, E. (2017, Februari Selasa). *Sorong-Merauke Tersambung Jalan Darat Berkat Trans Papua, Ini Rutenya*. Retrieved Mei Jumat, 2018, from DetikFinance: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3415454/sorong-merauke-tersambung-jalan-darat-berkat-trans-papua-ini-rutenya>
- Suryawan, I. N. (2017a). *Papua Versus papua*. Yogyakarta: Labirin.
- Suryawan, I. N. (2017a). *Suara-Suara Yang Dicampakkan: Ontran-Ontran Tak Berkesudahan di Bumi Papua*. Yogyakarta: BasaBasi.
- Suryawan, I. N. (2017b). *Papua Versus Papua: Perubahan dan Perpecahan Budaya*. Yogyakarta: BasaBasi.
- Suryawan, I. N. (2017b). *Suara-Suara yang Dicampakkan: Ontaran-Ontaran Tak Berkesudahan di Bumi Papua*. Yogyakarta: Basa Basi.
- Tornquist, O. (2011). *Penghancuran PKI*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Toyiban. (2017, Februari Rabu). *papuabarat.antaranews.com*. Retrieved Mei Minggu, 2018, from <https://papuabarat.antaranews.com/berita/715/tiongkok-sasaran-terbesar-ekspor-papua-barat>
- Wekke, I. S. (2017). Migrasi Bugis dan Madura di Selatan Papua Barat. *Intelektualita: Volume 06, Nomor 02*, 164.

- Widjojo, M. S. (2009). *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and securing the Future*. Jakarta: YOI.
- Wonda, S. (2009). *Jeritan Bangsa: Rakyat Papua Barat Mencari Keadilan*. Yogyakarta: Galang Press.
- Yoman, S. S. (2013). *Apakah Indonesia Menduduki dan Menjajah Bangsa papua? Tantangan dan Harapan Masa Depan Bangsa Papua Dalam Pemaksaan Nasionalisme Keindonesiaan dan Iprealisme Kapitalis di Papua*. Papua Barat: Cendrawasih Press.
- Yoman, S. S. (2013). *Apakah Indonesia Menduduki dan Menjajah Bangsa Papua? Tragedi dan Harapan Masa Depan Bangsa Papua Dalam Pemaksaan Nasionalisme Keindonesiaan dan Imprealisme Kapitalis di Papua*. Papua Barat: CendrawasihPress.